

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab 4 mengenai Prosedur Penatausahaan di Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :

Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bendahara pengeluaran memerlukan prosedur penatausahaan, agar pengelolaan pada instansi tersebut dapat berjalan secara tepat dan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam penatausahaan.

Dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Di Bendahara Pegeluaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terkait Penatausahaan Pengeluaran.

Adapun Prosedur Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Barat yaitu sbb :

1. Penerbitan SPD
2. Penerbitan SPP
 - SPP-UP
 - SPP-GU
 - SPP-TU
 - SPP-LS
3. Penerbitan SPM
4. Penerbitan SP2D
5. Pembuatan SPJ

Prosedur Pentausahaan Di Bendahara Pengeluaran dilakukan berdasarkan Permendagri yang sudah ditetapkan. Agar Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat agar tercapainya tujuan yang maksimal dalam Pengelolaan Keuangan serta pengelolaan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat supaya dapat dilaksanakan dengan baik.

5.2 Saran

Agar tercapainya Tujuan dalam Pengelolaan keuangan Pada Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Barat maka penulis dapat memberikan saran yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Setiap pejabat dalam Pengelolaan Keuangan pada SKPD diharapkan agar lebih teliti bekerja dalam Prosedur Penatausahaan, supaya terwujudnya penatausahaan yang baik.
2. Untuk staf/pegawai Dinas yang terkait, diharapkan agar dapat meningkatkan efektifitas kinerja dalam pendidikan formal maupun pengetahuan umum lainnya, khususnya dalam bidang computer.
3. Untuk staf/pegawai Dinas terkait, diharapkan untuk dapat melengkapi dokumen yang diperlukan secara lengkap dan sah, agar Pengelolaan Keuangan pada SKPD berjalan secara baik.